

PENDIDIKAN POLITIK DAN POLITIK PENDIDIKAN URGENSINYA BAGI SEBUAH BANGSA

*Sunarso
Jurusan PKn dan Hukum, FISE, UNY.*

Abstract

Pendahuluan

Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. Ilmu politik membahas secara sistematis dan analitis masalah kenegaraan, dan merupakan ilmu sosial yang paling tua di dunia. Tempat asalnya diduga negara Yunani, pada zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles

Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang beroperasi dengan konsep dan ide filosofis tersendiri, yang dipraktekkan dengan metode pertanyaan dan analisis tentang pengorganisasian suatu negara, dengan tujuan agar rakyat bisa hidup makmur dan bahagia. Ilmu tersebut diharapkan bisa memberikan tata hidup yang baik. Maka pikiran-pikiran politik Yunani di masa Plato merupakan campuran dari legenda, mite, teologi, alegori, dan religi. Plato menamakan pribadi manusia sebagai *homo politicus*, yaitu manusia politik secara abstrak, yang suka berpolitik, untuk menata masyarakat dan negaranya, tanpa memandang asal dan derajatnya, di satu negara.

Politik di abad pertengahan lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah spiritual, moral, dan etis. Maka politik dan etika di zaman itu tidak bisa dipisahkan satu dari lainnya. Sedang paham politik modern yang dipelopori oleh Machiavelli, menyatakan bahwa yang penting bukannya bagaimana seharusnya bentuk satu negara, akan tetapi bagaimana caranya kita bertindak dalam dunia politik dan diplomasi. Bagi Machiavelli tercapainya tujuan adalah segalanya. Segala cara bisa ditempuh untuk tercapainya suatu tujuan.

Pendidikan adalah merupakan proses sosial dan proses sosialisasi manusia. Proses sosial menjadi dimensi utama dari filsafat pendidikan. Adanya relasi sosial yang berbeda dalam wadah suatu negara, yang bergantung pada renggang dan dekatnya relasi sosial

antara individu dengan individu lain, akan menyebabkan munculnya praktek pendidikan yang berbeda-beda. Sebagai contoh di negara demokrasi orang menghargai perbedaan yang unik pada setiap individu. Oleh karena itu orang menyusun sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi pribadi-pribadi yang unik tadi.

Di negara totaliter orang membatasi kebebasan individu, dengan jalan memberikan pendidikan dengan pola *uniform*, ketat dan keras. Sistem pendidikannya hanya ada satu, berdasarkan satu macam filsafat pendidikan. Guru-guru sikapnya otoriter dan mutlak, serta mengajar dengan tangan besi. Guru dengan ketat meneruskan semua perintah dari kekuasaan politik yang juga otoriter sifatnya. Bagi negara totaliter, pendidikan adalah merupakan kekuatan politik. Karena itu pendidikan harus ada ditangan negara, dan negara secara mutlak mengatur pendidikan. Tujuan pendidikan di negara totaliter adalah membuat manusia menjadi alat negara.

Salah satu fenomena amat menakjubkan, bukan hanya dalam filsafat politik, tetapi juga dalam kesadaran nyata masyarakat adalah pengakuan hampir universal terhadap demokrasi. Meskipun seratus tahun yang lalu kebanyakan orang di bumi ini belum pernah mendengar apapun tentang demokrasi, sekarang keabsahan etis dan politis sebuah negara hampir di seluruh dunia diukur pada kadar kedemokrasiannya. Dalam negara demokrasi, juga tercakup hak-hak lain seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, hak memilih anggota perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia, hak kebebasan beragama, hak berorganisasi. Di negara demokrasi ada kebebasan yang sama bagi setiap warganegara, serta adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan martabat individu selaku pribadi. Pengakuan selaku pribadi itu mencakup pengertian bahwa manusia itu: (1) berhak memenuhi segala kebutuhannya yang kodrati; (2) berhak untuk meningkatkan derajat dan martabat dirinya; (3) berhak mendapatkan pengakuan terhadap milik pribadi. Oleh karena itu pendidikan harus diupayakan untuk, mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dengan bebas dan maksimal. Sanggup melakukan realisasi diri, supaya bisa hidup sejahtera. Tugas esensial negara demokrasi ialah mengembangkan potensi-potensi rakyatnya dalam iklim damai dan adil. Generasi muda harus mentransfer banyak warisan kebudayaan, misalnya bahasa, adat kebiasaan, tingkah laku, norma, nilai, keyakinan beragama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Semua itu dilakukan lewat media pendidikan dalam iklim yang bebas.

Lewat pendidikan anak didik memecahkan permasalahan hidupnya, untuk kemudian mengantisipasi terjadinya perubahan dan kemajuan di hari-hari mendatang. Oleh karena itu tingginya tingkat pendidikan dan taraf kebudayaan rakyat akan sangat besar artinya, bahkan vital bagi pertumbuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, negara sangat berkepentingan dengan pendidikan warga negaranya, sehingga pendidikan harus diutamakan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Di negara demokrasi, pendidikan tidak dilakukan lewat *drilling*, *dresur* *indoktrinasi*, tekanan, dan paksaan dari atas atau dari luar. Untuk melakukan pendidikan dengan bebas, dalam rangka mengembangkan kebebasan manusia, perlu adanya masyarakat bebas, dan kebebasan dalam dunia pendidikan. Menurut Plato dan Rousseau, dinamika kodrati yang ada pada diri setiap manusia ialah: (1) ambisi yang dinamis untuk memperbaiki nasib sendiri; (2) hasrat untuk mengangkat diri ke taraf yang lebih tinggi; (3) semangat untuk terus berjuang dan mendapatkan kemajuan dalam hidupnya. Alam demokrasi mengakui nilai individu dan martabat pribadi. Sedang negara demokrasi lewat sistem pendidikannya bertujuan membentuk warga negara menjadi pribadi dengan identitas unik. Setiap individu harus mendapatkan pendidikan yang layak sebagai manusia, disesuaikan dengan bakatnya. Tidak dapat berkembangnya bakat dan potensi manusia, jelas merupakan kesalahan politis dan teknis yang harus dikoreksi. Kesalahan serta kegagalan ini tidak saja merugikan individu yang bersangkutan, akan tetapi pasti juga memiskinkan masyarakat dan negara.

Pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik. Pendidikan dan sekolah adalah merupakan pencerminan kekuatan-kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada. Karena itu tujuan pendidikan erat sekali berkaitan dengan filsafat negara dan tujuan politik negara. Pendidikan juga merupakan penjabaran dari filsafat negara dan tujuan politik negara. Pendidikan itu tidak pernah netral. Artinya pendidikan bisa dipakai sebagai instrumen untuk mencapai kebebasan, atau justru digunakan sebagai alat untuk memperbudak, menindas dan membelenggu sesama manusia oleh pihak-pihak yang berkuasa. Pendidikan sering menjadikan anak didik sebagai objek, untuk tujuan politik dan komersial tertentu. Dalam kondisi ini pendidikan berubah wujud menjadi "*anti pendidikan*" disertai usaha "*dehumanisasi*".

Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Pentingnya pendidikan politik ini seperti dinyatakan oleh Print, bahwa negara-negara baru (*newly emerging democracies*) memerlukan sarana pendidikan yang memungkinkan generasi muda untuk mengetahui tentang pengetahuan, nilai-nilai, dan keahlian yang diperlukan untuk melestarikan demokrasi. Pendidikan politik adalah penyiapan generasi muda untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, seputar faktor-faktor yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga atau berpengaruh dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut. Yang esensial dari pendidikan politik adalah mengaitkan aktivitas pendidikan dengan praktek kekuasaan secara seimbang, berguna, dan demokratis (Edgar Fore).

Pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan politik bisa dilakukan dengan berbagai sarana seperti diskusi, ceramah, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik (Good). Pendidikan politik merupakan proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang ideal dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti pemerintah, sekolah, dan partai politik. Sosialisai politik adalah pendidikan politik dalam arti yang longgar. Disadari atau tidak, hal itu dialami oleh semua anggota masyarakat baik elit maupun orang awam.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan politik merupakan proses penanaman nilai-nilai di bidang politik yang dilakukan secara sengaja, baik formal maupun informal, dilakukan terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara demokratis dan bertanggung jawab.

Beberapa Teori Pendidikan Politik

Teori Sistem

Sosialisasi politik dianggap memainkan peran utama dalam menjaga kestabilan politik, sehingga memungkinkan sistem politik yang sama berlaku terus menerus sehingga mencapai kondisi mapan dan mantap. Menurut teori ini pendidikan politik diarahkan

untuk memelihara sistem politik yang dianggap ideal. Bagi Indonesia sistem politik ideal yang hendak dibangun adalah sistem politik demokrasi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Teori Hegemoni

Menurut teori ini, pendidikan politik diarahkan untuk mendukung kepentingan penguasa (kelompok yang dominan). Pendidikan politik dilakukan untuk kepentingan kelompok kekuatan politik tertentu, yakni rezim yang berkuasa, meskipun kadang jauh dari sistem yang ideal.

Teori Psikodinamik.

Menurut teori ini pengalaman pribadi yang dialami manusia pada awal anak-anak akan sangat menentukan orientasi politik seseorang. Dengan demikian faktor internal sangat mempengaruhi sikap politik seseorang.

Teori Belajar Sosial

Menurut teori ini faktor eksternal, yakni lingkungan sosial dimana seseorang hidup, bergaul, bermasyarakat, sangat menentukan sikap politik dari seseorang. Stimulus dari lingkungan seperti keluarga, sekolah, pergaulan sangat menentukan sikap politik seseorang.

Tujuan Pendidikan Politik

Di banyak negara berkembang pendidikan politik dan pendidikan demokrasi sering dianggap sebagai "*taken for granted or ignored*", yakni dianggap akan terjadi dengan sendirinya (Gandal dan Finn). Pendidikan politik dan demokrasi sebaiknya ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan politik dan demokrasi dapat dilakukan lewat dua jalur, yakni lewat pendidikan formal dan pendidikan non formal dalam masyarakat.

Pendidikan politik berperan sebagai *maintenance* atau *persistence*, untuk memelihara sebuah sistem politik (Almond). Pendidikan politik berfungsi sebagai *nation and character building* bagi sebuah bangsa. Pendidikan politik berfungsi sebagai "*representative government under the rule of law*" mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan hukum. Ciri pemerintahan demokratis adalah: adanya konstitusi, adanya pengadilan yang independen, adanya pemilu yang bebas, adanya kebebasan berpendapat, adanya kebebasan berserikat, dan diselenggarakannya *civic education*. Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warga

negara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu Pendidikan politik merupakan hal yang penting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis berdasar hukum.

Pendidikan politik yang berhasil akan mewujudkan warganegara demokratis dengan ciri-ciri berikut: berfikir dan berperilaku rasional, berpartisipasi aktif sebagai warga negara, memiliki informasi yang cukup tentang politik, loyal pada sistem politik, percaya dan patuh pada pemerintah, ada kepercayaan antar sesama warganegara (Almond). Ciri budaya demokrasi adalah dihargainya nilai-nilai egalitarian, pluralisme, keterbukaan, dialogis, persuasif, distribusi kekuasaan, oposisi dsb. Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi memerlukan sarana pendidikan yang memungkinkan generasi mudanya untuk mengetahui tentang pengetahuan, nilai-nilai dan keahlian yang diperlukan untuk melestarikan demokrasi.

Pendidikan politik (*political education*) bertujuan menyiapkan generasi muda untuk berpikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, seputar faktor-faktor yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga atau berpengaruh dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga. Esensi dari pendidikan politik adalah mengaitkan aktivitas pendidikan dengan praktek kekuasaan secara seimbang, berguna, dan demokratis (Edgar Fore).

Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang ideal dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti pemerintah, sekolah, dan partai politik (Ramlan Surbakti). Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian). Sosialisasi politik adalah merupakan pendidikan politik dalam arti yang longgar. Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya. Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan (Almond).

Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warga negara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Sosialisai Politik sebagai Sarana Pendidikan Politik

Sosialisasi politik dalam arti luas adalah merupakan cara bagaimana masyarakat mentransmisikan budaya politik dari suatu generasi ke generasi berikutnya (Kennet P Langton). Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi, yang bertujuan khusus untuk membentuk nilai-nilai politik, yakni tentang bagaimana seharusnya setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik (Almond). Sosialisasi politik adalah suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. melalui sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat terbentuk sikap dan orientasi politiknya.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai politik dari masyarakat kepada individu. Proses ini bisa berlangsung terus menerus sejak masa kanak-kanak sampai usia lanjut, selama hidup baik disadari maupun tidak. Proses pewarisan nilai-nilai politik dari generasi ke generasi berikutnya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses politik yang sedang berlangsung di negaranya, sehingga diharapkan setiap anggota masyarakat mau berpartisipasi dalam sistem politik.

Agen-Agen Pendidikan Politik

Sarana pendidikan politik meliputi, keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, serta kontak-kontak politik langsung (Almond). Di dalam keluarga, anak memperoleh pemahaman nilai-nilai, sikap-sikap dan orientasi yang diperkenalkan oleh orang tuanya. Dengan demikian anak memperoleh sosialisasi yang pertama kali baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat tertanam cukup kuat dalam benak anak tersebut. Keluarga memberikan pengaruh dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang dan kekuasaan. Di dalam keluarganya anak akan memperoleh pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga, sehingga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik anak, memberikan kecakapan untuk

melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik setelah dewasa.

Di sekolah anak akan menerima pendidikan politik secara sistematis dan terencana. dari sinilah anak memperoleh pengetahuan tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sementara itu, di dalam kelompok pergaulan, setiap anggota mempunyai kedudukan yang relatif sama dan saling memiliki ikatan-ikatan yang erat. Kelompok pergaulan tersebut mensosialisasikan anggota-anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompoknya. Di lingkungan pekerjaan individu-individu mengidentifikasi diri dengan kelompoknya.

Proses pendidikan politik terdapat dua tipe, yaitu tipe pendidikan politik tak langsung dan pendidikan politik langsung. Pendidikan politik bersifat langsung apabila melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai, atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah merupakan contoh dari pendidikan politik langsung. Sedangkan pendidikan politik tak langsung sangat kuat berlangsung di masa anak-anak sejalan dengan berkembangnya sikap penurut atau pembangkang terhadap orang tua, guru, dan teman, yaitu sikap-sikap yang cenderung mempengaruhi sikap di masa dewasa terhadap pemimpin-pemimpin politiknya dan terhadap sesama warga negara.

Ada tipe sosialisai politik langsung dan tidak langsung. Tipe sosialisasi politik langsung terdiri atas: *imitation*, *anticipatory socialization*, *political education*, dan *political experience*. Sedangkan tipe sosialisasi politik tidak langsung terdiri dari: *interpersonal transference*, *appereniceship*, *generalization*.

1. *Imitation* adalah sosialisasi politik dengan model meniru. Metode ini paling banyak dilakukan. Yang ditiru bisa berupa tingkah laku politik, ketrampilan politik, harapan-harapan politik, serta sikap politik. Modal dasar untuk dapat melakukan belajar politik dengan metode meniru adalah mobilisasi dan komunikasi. Contoh anak-anak pada umumnya memilih partai politik meniru pilihan orang tuanya.
2. *Anticipatory Socialization*, metode ini pada dasarnya dilakukan dengan cara menyiapkan diri tentang peran politik yang diinginkan. Misalnya orang tua atau

- guru dapat mendefinisikan peranan warga negara yang baik, sehingga anak dapat mengantisipasi peran yang dituntut oleh sistem politik nasionalnya.
3. *Political Education*, metode ini dilakukan dengan dialogis, terbuka, rasional. Contohnya di sekolah lewat Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuannya untuk mewujudkan "good citizen". Dilakukan dengan pendekatan ilmiah bukan dengan cara indoktrimasi.
 4. *Political Experiance*. Metode ini menekankan adanya kontak politik langsung, dengan para pejabat yang terlibat dalam pembuatan keputusan.
 5. *Interpersona Transference*. Pengalaman hubungan pribadi dengan orang tua dalam keluarga, ataupun dengan guru di sekolah, akan menjadi pengalaman anak kelak berhubungan dengan figur penguasa.
 6. *Apperenticeship* (magang). Aktivitas-aktivitas non-politik dijadikan sarana sebagai praktek magang untuk aktivitas politik. Misalnya aktivitas dalam kepramukaan, aktivitas di oraganisasi sekolah, dan organisasi kenasyarakatan adalah bentuk penting dalam pembelajaran politik.
 7. *Generalization*. Nilai-nilai umum yang dianut masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk budaya politik dalam suatu masyarakat.

Sekolah sebagai agen sosialisasi politik memegang peranan penting. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan sosialisasi politik lewat sekolah dipengaruhi agen-agen lain. Namun sosialisasi politik lewat sekolah sering dinyatakan lebih bermakna dibandingkan melalui agen-agen yang lain. Karena sekolah memiliki karakteristik terprogram, sistematis, dan menggunakan kurikulum. Sekolah merupakan tempat bertemunya bermacam-macam "orientasi politik" yang telah diperoleh nelalui sosialisasi politik lewat agen yang lain. Sehingga sosialisasi politik di sekolah, dapat mempertajam dan memperluas orientasi politik peserta didik.